



Bilik-Bilik Demokrasi dalam Pendidikan

Mukodi

STKIP PGRI Pacitan

Abstract

Not only having state and nation that requires democratic civility, but education also urgently requires fundamental democratic principles. The democracy is principled with transparency, participation, tolerance, openness of thought and diversity of ideas. Also with education, taking apart in culture and being naturally with it. The realization of the democratic education constructs academic maturation process. Lastly, it has impact on the building of the tolerant and humanist individual; that finally, realizing the leading Indonesian generation who ready to compete in the global world arena. The realization also have to be pursued through the contestation of the real democracy education.

Abstrak

Bukan hanya bernegara dan berbangsa yang membutuhkan keadaban demokrasi, tapi pendidikan pun sangat membutuhkan prinsip-prinsip demokrasi yang asasi. Demokrasi berprinsipkan transparansi, partisipatif, toleransi, keterbukaan pemikiran, dan keragaman ide serta gagasan. Demikian halnya dengan pendidikan, meretas kultur dan alaminya pun dengan hal itu. Terwujudnya pendidikan demokratis menjadikan proses pematangan akademik. Ujungnya berdampak pada terbentuknya manusia toleran dan humanis. Muara akhirnya, mewujudkan generasi Indonesia yang handal dan siap berkompetisi dalam percaturan dunia global. Perwujudannya pun harus diupayakan melalui ruang kontestasi pendidikan demokrasi yang sesungguhnya.

Keywords: Democracy, Education, and Human.

Coressponding author

Email: mukodi@yahoo.com

Pendahuluan

Fenomena terpenting yang mewarnai transformasi global dalam tiga dasawarsa ini adalah menguatnya tuntutan demokratisasi, khususnya di negara-negara berkembang, termasuk negara yang berpenduduk mayoritas Islam. Demokrasi telah menjadi diskursus yang melibatkan hampir semua komponen masyarakat. Praktis, diskursus-diskursus lain yang melawan kecenderungan ini pun menjadi termarginalkan (Masdar 1999, 1).

Derasnya tuntutan demokratisasi dan maraknya diskursus demokrasi tidak lain karena adanya anggapan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem yang bisa menjamin keteraturan publik dan sekaligus mendorong transformasi masyarakat menuju suatu struktur sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan yang lebih ideal. Ideal dalam arti, manusiawi, *egaliter*, dan berkeadilan. Demokrasi yang diyakini sebagai sistem yang paling realistis dan rasional untuk mencegah suatu struktur masyarakat yang dominatif, refresif, dan otoritarian.

Ditilik secara historis, diskursus demokrasi telah melahirkan teoritisasi demokrasi. Korelasi antara diskursus demokrasi dan tuntutan demokratisasi bersifat timbal balik atau saling mempengaruhi kuatnya tuntutan demokratisasi menyebabkan maraknya diskursus demokrasi atau maraknya diskursus telah mendorong dan menyadarkan komponen masyarakat untuk mendukung gerakan pro demokrasi (Siswanto 2006). Sementara itu, jika ditilik secara konseptual keislaman, dalil-dalil tentang demokrasi sangat banyak ragamnya, diantaranya pada Q.S. *Ali Imran* 59, Q.S. *Asy-Syuura*: 38, dan hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah.

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (Q.S. *Ali Imran*: 159). “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.” (Q.S. *Asy Syura*: 38). “Apabila salah seorang kamu meminta bermusyawarah dengan saudaranya, maka penuhilah”. (HR. Ibnu Majah).

Dengan kata lain, demokrasi pun memiliki akar epistemologi teks-teks keislaman yang kokoh. Tak heran, jika gelombang demokratisasi menggelinding tidak saja dalam tatakonegaraan dan pemerintahan, bahkan mulai menjalar hingga ke bilik-bilik pendidikan dan ruang kelas. Prinsip-prinsip demokrasi pun dalam batas-batas tertentu mulai dipraktikkan di dunia persekolahan. Hal itu terlihat dalam pelbagai suksesi kepemimpinan di level SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK mulai melaksanakan prinsip-prinsip demokratis. Sebut saja, prosesi pemilihan ketua kelas, ketua OSIS, PMR, Pramuka dan sejumlah keorganisasian

lainnya. Di level PTN/PTS pun demikian adanya, civitas akademika mulai menancapkan pilar-pilar demokrasi dalam kadar kearifan lokal masing-masing.

Namun, harus diakui ruang demokrasi belum sepenuhnya dipraktikkan secara elegan. Kebebasan berfikir, kebebasan merumuskan, dan menyatakan pendapat yang berbeda belum membudaya. Keseragaman, keteraturan, dan kepatuhan pun masih mengakar kuat di persekolahan. Selain itu, dunia persekolahan cenderung berkuat di ranah kognitif, belum berkerak secara massif di ranah afektif, dan psikomotorik. Ada memang lembaga pendidikan yang membuka kran demokrasi secara lebih longgar, tapi jumlahnya relatif kecil.

Di samping itu, tidak sedikit dunia persekolahan masih meneguhkan dinasti kekerabatan dalam melakukan rekrutmen pegawai, karyawan, dan tenaga kependidikan. Praktis, sistem rekrutmen menjadi sangat kenyal dengan unsur *like dislike* (suka-tidak suka), siapa yang membawa dan siapa yang merekomendasikan. Maka tidak bisa dipungkiri jika dunia persekolahan mulai di level rendah hingga perguruan tinggi masih mementingkan unsur subyektifitas daripada obyektifitas dalam memutuskan pelbagai kebijakan.

Padahal, esensi pendidikan adalah meneguhkan asas-asas keadilan, transparansi, akuntabel, nirlaba, kesamaan hak dan kesamaan kesempatan. Lebih dari itu, memberikan pengalaman kepada peserta didik agar dapat belajar mengetahui (*learning to know*), belajar melakukan (*learning to do*), belajar menjadi (*learning to be*), dan belajar hidup bersama (*learning to live together*). Dalam konteks itu, tulisan ini mencoba mengungkap bilik-bilik demokrasi dalam pendidikan, dengan harapan dapat menempati ruang-ruang kosong konsep pendidikan yang dari waktu ke waktu tengah mengalami krisis demokrasi yang sesungguhnya.

Pendidikan Demokratis: Kematangan Akademik

Aktifitas pendidikan pada hakikatnya bersumber pada landasan pendidikan. Walau harus diakui, menyoal landasan pendidikan di Indonesia seolah menjadi hal yang sangat muskil (Lengeveld dalam Dimiyati 2009, 148). Hal itu disebabkan karena secara empiris, pendidikan merupakan peristiwa sosial sehari-hari yang kompleks, yang di dalamnya terdapat proses multidimensi interaksi. Secara teknis, tindak pendidikan mencakup tiga sisi tindakan; tindakan logis (berkenaan dengan isi pendidikan), tindakan strategis (berkenaan dengan upaya pencapaian tujuan), dan tindakan-tindakan institusional, baik makro maupun mikro.

Selain itu, secara teoritis, teoritasi tentang pendidikan yang didasarkan atas penelitian keilmuan tidak banyak dilakukan. Sebaliknya, teoritasi tentang pendidikan pada kebudayaan Eropa yang didasarkan atas penelitian keilmuan banyak dilakukan. Secara normatif, teoritasi berorientasi nilai kebudayaan lokal, nusantara, Indonesia, universal, dan religius. Di sisi

lainnya, secara filosofis, tindak pendidikan menuntut pada satu sisi adanya pengakuan tentang hakikat manusia; tuntutan tentang adanya hakikat manusia yang relevan dengan tindak pedagogis tersebut telah dibuktikan dengan analisis fenomenologis, bahwa “manusia adalah *animal educandum*” yang secara antropologis-filosofis relevan dengan pandangan bahwa “manusia adalah makhluk individu, sosial, moral, beriman, berakal, dan berkepribadian”.

Aktifitas pendidikan pun seringkali direduksi dalam bentuk-bentuk yang lebih sempit. Sebut saja, dunia sekolah menjadi bentukan yang lebih kecil. Sekolah dipersempit lagi dalam aktifitas pembelajaran di ruang kelas. Pembelajaran di ruang kelas adalah bagian dari aktifitas pendidikan di sekolah. Praktis, pembelajaran di kelas pun harus dikemas dengan suasana yang nyaman, egaliter, humanis, dan bermakna. Kondisi ini mendorong terwujudnya budaya akademik yang baik, sehingga berdampak langsung pada prestasi dan *output* yang baik pula.

Sebaliknya, proses pembelajaran yang otoriter, baik secara manajemen, interaksi atau transaksi, proses kedudukan, maupun substansinya tidak mungkin menghasilkan manusia demokratis (Uno 2011, 12). Ini mengindikasikan bahwa membangun dunia pendidikan harus menggunakan ruh demokratis. Praktis, pendidikan merupakan tangga menuju kehidupan demokrasi. Tanpa pendidikan yang baik warga Negara tidak akan dapat melaksanakan kehidupan demokratis. Praktik pendidikan demokratis di Indonesia biasanya diretas oleh sekolah-sekolah non formal, sekolah alam, dan *homeschooling*, misalnya seperti SMP Alternatif Qaryah Thayyibah.

SMP (QT) terletak di Desa Kalibening, Salatiga. Sekolah ini dilaksanakan di rumah salah satu penduduk desa dengan menggunakan sistem pendidikan berbasis komunitas. Artinya, segala sesuatunya didasarkan pada kebutuhan komunitas. Dengan demikian, pendidikan berbasis komunitas adalah satu solusi untuk masyarakat Indonesia yang masih kental dengan kultur kekerabatan. Pendidikan yang berbasis komunitas ini memiliki prinsip-prinsip dasar yang diterapkan yaitu: membebaskan, keberpihakan, partisipatif, kurikulum berbasis kebutuhan, kerjasama, sistem evaluasi berpusat pada subyek didik, serta kepercayaan diri.

Disamping itu, pendidikan ini berbasis pada alam. Penggunaan alam sebagai media belajar diharapkan agar kelak siswa jadi lebih sadardengan lingkungannya dan bisa mengaplikasikan pengetahuan yang dipelajari, tidak hanya sebatas teori. Meski mengadopsi kurikulum nasional, SMP QT lebih menggunakan pendekatan pendidikan yang membebaskan, di mana siswa-siswinya diberi kebebasan untuk berperan aktif di dalam kelas. Para siswa-siswi adalah anak-anak dari buruh tani setempat yang begitu lantang berbicara di kelas. Mereka berani mengemukakan pendapatnya sendiri. Tentunya sikap-sikap seperti ini sangat baik sebagai modal mereka menjalani kompetisi kehidupan nanti (Suparwi 2011, 3).

Selain itu, pendidikan non formal yang bisa dikatakan sebagai pendidikan yang melaksanakan prinsip-prinsip demokratis adalah lembaga pesantren tradisional, meskipun seringkali “dilabeli” sebagai lembaga pendidikan yang *kolot*, *sektarian*, primordial, dan otoritatif. Anggapan-anggapan tersebut, tentu tidak sepenuhnya benar dan juga tidak sedikit yang salah. Pesantren mempunyai kekhasan dan keunikan tersendiri dalam menempekan santrinya agar menjadi pribadi-pribadi unggul. Cara, metode, dan model pendidikannya pun berbeda satu sama lainnya.

Namun demikian, pada hakikatnya pesantren-pesantren tradisional telah mempraktikkan nilai-nilai demokratis secara baik dan utuh. Hal ini dapat dilihat dengan jelas mulai dari proses rekrutmen santri, proses pendidikan, dan luaran (alumni) yang tersebar di masyarakat. Rekrutmen santri dilaksanakan dengan model terbuka. Setiap orang bisa menjadi santri. Tidak ada batas waktu pendaftaran, usia latar belakang, dan status sosial. Proses pendidikan diramu dengan racikan kurikulum mandiri ala sang kiai. Gambaran demokratis ditunjukkan dalam mata pelajaran Fiqih. Kitab Fiqih merupakan kitab yang mengajarkan pelbagai pandangan ulama dari berbagai madzab tentang hukum dan kaidahnya, sehingga membentuk pola pikir santri yang pluralis dan toleran terhadap ragam perbedaan (Mukodi 2015, 148).

Alumni pesantren pun pada umumnya mempunyai tanggung jawab yang sama, antara pesantren satu dan lainnya, yakni dituntut menjadi manusia yang baik, dan bermanfaat. Bermanfaat untuk dirinya sendiri, keluarga, bahkan masyarakat di sekitarnya. Slogan pesantren yang sangat lazim didengung-dengungkan adalah “*khoirunnas anfauhum linnas* (sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesama)”, “*ballighu anni walau ayaat* (sampaikan dariku, walau satu ayat)”. Menjadi sangat rasional, jika alumni pesantren di mana pun ia berada, berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat, tentunya dengan cara dan kekhasan yang dimilikinya. Biasanya alumni yang memiliki tingkat keilmuan yang mumpuni meretas pesantren baru di desanya, atau menjadi kiai di kampungnya.

Memang ada realitas di atas yang sifatnya paradoks dengan kondisi di lapangan saat ini. Tindak kekerasan dalam pendidikan justru kembali terjadi di tengah pelbagai elemen memperjuangkan terwujudnya pendidikan humanis. Sebut saja, kasus terbaru soal mendidik yang “sadis” dilakukan oknum guru kelas VI (berinisial RS) di SDN Jati Mulya VII, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, diduga dengan sengaja telah memukul murid satu kelas sebanyak 39 anak. Pemukulan ini dilakukan dengan menggunakan penggaris besi, gara-gara para murid tidak hafal isi Pasal 18 ayat (1) UUD 1945. Kejadian ini kontan membuat berbagai pihak mengancam perilaku oknum guru tersebut. Seorang guru harusnya sabar dalam menyampaikan dan mencerdaskan siswanya justru bertindak emosional, destruktif, dan anarkis (edukasi.kompasiana.com, 31/08/2013).

Gara-gara melempar buah pepaya milik gurunya, MN, seorang murid Sekolah Dasar mendapatkan tendangan dan tamparan (tribunnews.com, 20/08/2013). Selain itu, DI, guru mata pelajaran seni dan budaya SMK PGRI 3 Kota Bogor, mengaku memukul keenam siswanya karena kesal. Pasalnya keenam murid tersebut sering mengabaikan tugas yang telah diberikan. (metro.sindonews.com, 31/02/2013).

Kasus tindak kekerasan dalam pendidikan seolah menjadi rentetan peristiwa yang panjang. Dalam sebuah riset yang dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) *Plan International* dan *International Center for Research on Women* (ICRW) yang dirilis awal Maret 2015 ini menunjukkan fakta mencengangkan terkait kekerasan anak di sekolah. Terdapat 84% anak di Indonesia mengalami kekerasan di sekolah. Angka tersebut lebih tinggi dari tren di kawasan Asia, yakni 70%. Riset ini dilakukan di 5 negara Asia, yakni Vietnam, Kamboja, Nepal, Pakistan, dan Indonesia yang diambil dari Jakarta dan Serang, Banten. Survei diambil pada Oktober 2013 hingga Maret 2014 dengan melibatkan 9 ribu siswa usia 12-17 tahun, guru, kepala sekolah, orangtua, dan perwakilan LSM (news.liputan6.com).

Lebih dari itu, data dari Badan PBB untuk Anak (Unicef) menyebutkan, 1 dari 3 anak perempuan dan 1 dari 4 anak laki-laki di Indonesia mengalami kekerasan. Data ini menunjukkan kekerasan di Indonesia lebih sering dialami anak perempuan. Padahal, Indonesia memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan yang melindungi anak dari tindak kekerasan. Seperti UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti-kejahatan Seksual terhadap anak, dan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun penerapan perangkat hukum ini masih terbentur beragam kendala seperti ketidaktahuan masyarakat dan kurangnya komitmen pemerintah daerah. Penerapan yang belum optimal ini membuat anak-anak di Indonesia belum sepenuhnya.

Dalam konteks itu, idealnya pendidikan lebih berorientasi untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri peserta didik, sehingga ia mampu menjadi manusia berkualitas. Manusia berkualitas tentunya tidak hanya identik dengan tingginya intelektualitas. Namun, sejauh mana peserta didik tersebut bisa menjadi pribadi yang mandiri. Pribadi yang mampu menciptakan kreasi dalam hidupnya, sehingga ia mampu menghadapi pelbagai perubahan di kemudian hari. Kondisi tersebut tentu harus didesain sedemikian rupa melalui pendidikan yang *momot* nilai-nilai kemanusiaan. Muaranya, ia benar-benar mendudukkan dirinya sebagai manusia yang bermartabat, bukan kebalikannya, menjadi manusia yang bejat, dan nista.

Poin terpenting yang harus diwaspadai adalah tindak kekerasan yang terjadi dalam dunia pendidikan, biasanya diakibatkan karena adanya kesalahan yang diikuti dengan hukuman fisik. Misalnya peserta didik yang tidak mengerjakan Pekerjaan Rumah (PR), atau

terlambat datang, lantas dihukum berdiri di depan kelas sampai jam pelajaran berakhir. Bahkan tidak sedikit dari mereka harus berlari mengelilingi lapangan, atau sampai kena pukul. Dulu model hukuman (*punishment*) seperti ini memang sering kali dilakukan oleh sang guru. Tujuannya, tidak lain hanya memberikan efek jera kepada sang murid. Namun dalam konteks kekinian, model hukuman semacam ini sudah tidak relevan lagi untuk dipraktikkan. Sebab proses pendidikan tidak harus dilakukan dengan cara-cara kekerasan. Pendidikan saat ini lebih mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Posisi peserta didik, bukan lagi sebagai obyek, tapi menjadi bagian dari subyek pendidikan itu sendiri (Mukodi 2011,17). Hal itu, seolah menegaskan tidak ada *oposisi biner* antara pendidik dan peserta didik, keduanya sama derajatnya.

Lebih dari itu, semestinya proses pendidikan harus berbasis kemanusiaan. Pendidikan yang dikembangkan melalui nilai-nilai kemanusiaan tentunya mengedepankan media dialogis sebagai alat komunikasi. Melalui komunikasi yang intensif, pendidikan dapat berjalan dengan baik. Tidak heran, jika John Dewey, seorang tokoh pendidikan, sekaligus pegiat demokrasi menegaskan bahwa: “...*education consists primarily in transmission through communication. Communication is a process of sharing experience till it becomes a common possession. It modifies the disposition of both the parties who partake in it*”(www.vusst.hr, 25/12/2016).

Interaksi antara peserta didik dengan pendidikan yang terjalin dengan harmoni akan menjamin budaya akademik yang baik. Budaya akademik yang terbangun dengan sendi-sendi kebaikan, nantinya melahirkan kematangan akademik. Kematangan akademik berdampak positif terhadap luaran pendidikan. *Alhasil*, luaran pendidikan yang dihasilkan adalah pribadi-pribadi yang tangguh, ulet, tahan banting, tahan uji, pantang menyerah, terampil, dan mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitar.

Pendidikan Demokratis: Manusia Toleran

Pada prinsipnya, pendidikan demokrasi adalah proses di mana siswa berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan sekolah. Lewat partisipasi ini, para siswa akan berinteraksi dengan guru dan pendidik yang lain untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang baik. Megan Howey,--salah seorang tokoh dalam pendidikan demokrasi--menyatakan bahwa pendidikan demokrasi merupakan suatu cara yang jitu untuk memperkuat kebersamaan dan kerjasama dari seluruh komponen sekolah, khususnya para guru, siswa dan orang tua siswa (Zamroni 2011, 25).

Lebih lanjut, Zamroni (2011, 28) menjelaskan bahwa pendidikan demokrasi harus menekankan pada empat aspek. Pertama, kurikulum dan pembelajaran pendidikan demokrasi harus menyampaikan pesan-pesan atau isi yang penting dan bermakna. Siswa

didorong untuk mengembangkan *critical thinking* bersumber pada perpaduan teoritis dan realitas sekitar agar dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Kedua, berkaitan dengan karakteristik pertama, maka materi pendidikan demokrasi yang dibawa ke ruang-ruang kelas tidak hanya bersifat “pengetahuan teoritis murni” melainkan dipadukan “*controversial issues*” yang tengah merebak di masyarakat. Dengan kata lain, pembelajaran membuka simpul-simpul diskursus wacana sosial kemasyarakatan, sehingga warga sekolah dapat menawarkan solusi alternatifnya.

Ketiga, pendidikan demokrasi memberikan pelayanan pembelajaran yang optimal kepada siswa. Dalam kaitan pelayanan pembelajaran ini, John Dewey--filosof dan pionir pendidikan demokrasi--menekankan bahwa pendidikan demokrasi mengimplementasikan kurikulum yang fleksibel dan terbuka, sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan siswa (www.vusst.hr, 25/12/2016).

Keempat, dilaksanakannya pendidikan ekstra kurikuler yang berorientasi pada penyiapan siswa menuju pribadi yang tangguh, dan bertanggung jawab. Kelima, dikembangkannya partisipasi dalam pengelolaan sekolah. Keenam, dilaksanakannya simulasi proses demokrasi di sekolah. Apa yang ada di masyarakat di sekolah, sesuai dengan prinsip pendidikan. Sekadar contoh, jika di masyarakat ada sistem pemerintahan dan lembaga pemerintahan, maka sekolah pun perlu dikembangkan sistem dan keberadaan pemerintahan siswa.

Aspek-aspek tersebut di atas, sepertinya mudah dipahami, tapi sejatinya sulit dilaksanakan, apalagi di Indonesia. Keragaman suku, bahasa, etnis, demografi, geografi, kultur, sistem politik, dan keunikan penduduk menjadikan konsep pendidikan demokrasi sangat sulit diterapkan. Sekadar contoh, pada aspek kurikulum misalnya, ketercapaiannya sulit terlaksana. Aspek kualitas sumberdaya Jawa dan luar Jawa jauh berbeda. Belum lagi, aksesibilitas propinsi *versus* kabupaten. Kota *versus* desa. Sekolah unggulan *versus* non unggulan. Sekolah favorit *versus* non favorit. Sekolah negeri *vis a vis* swasta. Strata peringkat akreditasi (A, B dan C) pun menjadi pembeda. Semua itu, menjadi deret angka, sulitnya terimplementasinya suatu kurikulum.

Meskipun demikian, perwujudan pendidikan demokratis harus diupayakan. Banyak efek positif dari pendidikan demokratis. Salah satu buah dari pendidikan demokratis adalah terwujudnya manusia toleran. Hal itu diejohwantikan melalui cinta kasih, penghargaan, dan penerimaan keragaman pendapat. Lantas apa yang harus dilakukan agar benih-benih toleransi dapat teretas dalam dunia persekolahan?

Demokrasi dalam Pendidikan: Membentuk Manusia Humanis

Pendidikan, khususnya pendidikan formal sistem persekolahan, disingkat dengan sebutan sekolah, memiliki struktur, kultur dan proses. Disebut sekolah yang demokratis manakala struktur, kultur dan proses sekolah itu mengandung nilai-nilai dan karakteristik demokrasi. Seperti, terdapat kebebasan, kesetaraan, keseimbangan kekuasaan, keadilan, musyawarah, toleransi dan partisipasi (Zamroni 2011, 44).

Lebih lanjut dijelaskan, bahwa struktur sekolah bisa disebut demokratis apabila dalam struktur tersebut tidak ada dominasi satu bagian atas bagian yang lain tanpa kontrol dari pihak manapun. Ketiadaan kontrol ini akan menjurus munculnya *absolute power*. Sebab kekuasaan, terlepas dari besar dan kecil, dan dari siapa pun yang menguasainya memiliki potensi untuk disalahgunakan. *Power tends to corrupt. Absolute power absolutely*. Karena itu, kekuasaan tidak boleh dipusatkan di salah satu tangan, lembaga, daerah, ataupun kelompok orang (Mudasir, "desentralisasi pendidikan politik dan demokrasi". (banyuasinkab.go.id).

Sekolah yang demokratis adalah sekolah yang memiliki kultur demokratis. Kultur merupakan totalitas, organisasi *way of life*, termasuk nilai-nilai, norma, lembaga, dan karya yang diwariskan antar generasi. Kalau konsep ini diaplikasikan di sekolah, muncul konsep kultur sekolah, yakni norma-norma, nilai-nilai, keyakinan, sikap, harapan-harapan, dan tradisi yang ada di sekolah.

Kultur sekolah pun sangat menentukan pola perilaku warga sekolah, memiliki dampak yang luar biasa atas kinerja, dan mempengaruhi bagaimana warga sekolah, berfikir, bersikap dan bertindak. Alih kata, kultur sekolah menempati peran yang strategis, karena pembelajaran yang baik hanya dapat berlangsung pada sekolah yang memiliki kultur positif. Kultur sekolah yang sehat akan berdampak pada kesuksesan siswa dan guru.

Terwujudnya manusia humanis dari produk pendidikan adalah pekerjaan berat yang menjadi bidang garapan semua Negara saat ini. Produk manusia humanis dapat segera terwujud, jika struktur, proses dan kultur pendidikan menyehatkan manusia terdidik yang hidup di dalamnya. Agar dapat membentuk, struktur pendidikan yang baik, tentu harus ada sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat tercipta, jika proses pendidikannya pun berkualitas pula. Struktur, dan proses pendidikan yang baik akan rusak, jika kultur pendidikan tidak tercipta dengan baik. Praktis, struktur, sumberdaya manusia, dan kultur harus selaras dengan idealisasi pendidikan yang demokratis.

Pertanyaannya, mana yang harus dibangun lebih awal? Jika, menggunakan perspektif pemikiran John Dewey, kultur pendidikan lebih didahulukan. Hal ini didasarkan pada pelbagai tulisan Dewey yang mengatakan, bahwa

We never educate directly, but indirectly by means of the environment. Whether we permit chance environments to do the work, or whether we design environments for the purpose makes a great difference. And any environment is a chance environment so far as its educative influence is concerned unless it has been deliberately regulated with reference to its educative effect (vusst.hr, 25/12/2016).

Dengan demikian, lingkungan menjadi hal yang sangat penting dalam membangun pendidikan. Banyak hal disemaikan dari lingkungan, dan peserta didik pun memungut pelbagai pengalaman darinya. Komponen material kultur pendidikan pada hakikatnya terbentuk dari lingkungan. Alhasil, lingkungan pendidikan membentuk kultur pendidikan. Jika lingkungannya baik, kultur pendidikannya juga menjadi baik. Sebaliknya, jika lingkungannya buruk, buruk pula kultur pendidikannya.

Menuju Ruang Demokrasi Pendidikan

Harus diakui, praktik persekolah dalam dunia pendidikan acapkali dipenuhi dengan tempelan *kamuflase* lipstick demokrasi. Kemerdekaan semu dalam berfikir, bersikap dan bertindak. Meminjam bahasa Rendra dalam puisinya, "...ma bukan kematian yang ku takutkan, tapi kehidupan yang tidak hidup yang ku takuti..." atau dalam bahasa Cak Nun disebut dengan istilah "matinya rasa." Mati rasa merupakan bentuk ketidakpekaan terhadap orang lain, sehingga menjadikan seseorang menjadi apatis, pragmatis dan oportunis.

Padahal, pendidikan menurut Ki Hadjar Dewantara (1977, 95) adalah sebagai berikut:

Pendidikan dan pengajaran yang terluhur adalah terkandung dalam kodrat alam. Untuk mengetahui kodrat alam itu perlulah orang mempunyai *wijsheid*, atau bersihnya budi, yang harus terdapat dari tajamnya angan-angan, halusnya rasa, dan suci-kuatnya kemauan, yaitu sempurnanya cipta, rasa, karsa. Maksud pendidikan itu ialah sempurnanya hidup manusia, hingga dapat memenuhi segala keperluan hidup lahir dan batin yang kita dapat dari kodrat alam.

Kodrat alam dalam perspektif Ki Hadjar tentunya sama dengan pandangan John Locke (1632-1704) yang beranggapan bahwa manusia bagaikan kertas yang belum ditulisi. Lingkunganlah yang membentuk seseorang menjadi manusia seperti waktu dewasa. Kodrat alam tentunya identik dengan kebebasan dan keteraturan.

Kebebasan dan keteraturan dalam pendidikan dikemas dalam dialog interaktif yang baik. Hal ini diperkuat pula oleh Jane Roland Martin yang mengatakan "*Education is primarily a process in which educators and educated interact, and such a process is called education if and only if it issues or is intended to issue in the formation, in the one being educated, of certain desired or desirable abilities, habits, dispositions, skills, character traits, beliefs, or bodies of knowledge.*"

Dalam konteks itu, demokrasi dalam pendidikan semestinya bisa segera diretas, dan dibudayakan. Hal ini menjadi sangat penting, dikarenakan dengan adanya sistem pendidikan

yang demokratis akan melahirkan generasi unggul yang toleran dan humanis. Agar terjadinya percepatan sistem pendidikan yang demokratis diperlukan telaah agregatif untuk mengurai benang kusut kultur pendidikan otoritatif. Telaah agregatif merupakan pemecahan masalah secara berlapis dan berjenjang dari pelbagai perspektif dalam memecahkan objek permasalahan (Muhadjir 2002, 6).

Kesimpulan

Proses pendidikan yang dilaksanakan dengan nilai-nilai demokratis berdampak pada kematangan akademik. Nilai-nilai demokratis terinternalisasikan melalui paradigma egalitarian, sikap dan perilaku yang *open minded*. Tidak mudah marah terhadap perbedaan pendapat, dan memahami pentingnya arti keragaman. Nilai-nilai demokratis inilah, nantinya membentuk terlaksananya pendidikan demokratis.

Buah dari pendidikan demokratis, adalah terwujudnya manusia toleran dan humanis. Toleransi dijabarkan melalui aktifitas pemikiran dan tindakan yang penuh cinta, kasih dan sayang, tanpa memandang status identitas kemanusiaan. Prilaku humanis dipraktikkan melalui kepekaan subyek didik terhadap sesama.

Referensi

- Dimiyati, Mohammad. 2009. "Landasan Pendidikan Analisis Keilmuan, Teorisasi dan Praktik." dalam Kumpulan pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Negeri Malang, Malang: IKIP Malang.
- Dewey, John. tt. *Democracy and Education*. A Penn State Electronic Classics Series Publication.
- Dewey, John. 1997. *Experience and Education*. New York: Kappa Delta Pi.
- Mukodi. 2011. *Mendialogkan Pendidikan Kita: Sebuah Antologi Pendidikan*. Yogyakarta: Magnum Pustaka.
- Mukodi. 2015. *Menjaga Umat Pilar-Pilar Budaya Pondok Tremas Pacitan Di era Global*. Yogyakarta: Lentera Kreasindo.
- Muhadjir, Noeng. 2000. *Kebijakan dan Perencanaan Sosial Pengembangan Sumber Daya Manusia Telaah Cross Discipline*. Yogyakarta: rake Sarasin.
- Roger, Marples. 1999. *The Aims of Education*. New York: Routledge.
- Suparwi, Sri. tt. *Pendidikan Berbasis Alam: Refleksi atas pendidikan di Qaryah Thayyibah, Kalibening, Kota Salatiga*. STAIN Salatiga.
- Tim Taman Siswa. 1977. *Karya Ki Hadjar Dewantara Bagian Pertama*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- http://www.vusst.hr/ENCYCLOPAEDIA/john_dewey.htm, diakses pada 25/12/2016